

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM RINTISAN MODEL DESA BERDIKARI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 DI KABUPATEN BLORA

Oleh:

**ADI PURWANTO
PROGRAM DOKTOR ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2017**

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah sosial yang multidimensi, oleh karena itu memerlukan penanganan yang komprehensif. Gubernur Jawa Tengah memberikan prioritas penanganan yang tinggi terhadap masalah pengurangan kemiskinan, sesuai dengan RPJMD Jawa Tengah tahun 2013-2018. Pada Maret 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 4,836 juta jiwa (14,46%) dengan distribusi di perdesaan sebanyak 2,891 juta jiwa (59,78%) dan di perkotaan sebanyak 1,945 juta jiwa (40,22%). Mengingat jumlah penduduk miskin di perdesaan lebih banyak dibanding perkotaan, oleh sebab itu penanggulangan kemiskinan di perdesaan perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang lebih konseptual, sistematis serta berkelanjutan. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 11 tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Rintisan Model Desa Berdikari Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015, maka untuk menanggulangi kemiskinan di Perdesaan Blora telah ditunjuk desa: Temulus, Sumberejo dan Pilang Kecamatan Randublatung sebagai Rintisan Model Desa Berdikari. Jenis Kegiatan yang dipilih untuk menanggulangi kemiskinan adalah peternakan kambing, pembuatan paving dan batik printing. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui Rintisan Model Desa Berdikari.

Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah model deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis data yang diperoleh dari lapangan dengan menggunakan teori dari Van Meter dan Van Horn,

Hasil penelitian ini adalah, bahwa implementasi kebijakan dari program Rintisan Model Desa Berdikari dapat berjalan dengan baik, meski perlu penyempurnaan dari segi regulasi, implementasi, koordinasi, komunikasi, sinkronisasi dan sinergitas program antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora.

Keyword: Kemiskinan, Desa Berdikari, sinergitas, deskriptif-kualitatif

ABSTRACT

Poverty is a social problem that is multidimensional, and therefore requires a comprehensive treatment. Central Java Governor gives a high priority to the problem of handling poverty reduction, according to RPJMD Central Java in 2013-2018. In March 2014 the number of poor people reached 4.836 million (14.46%) with distribution in rural areas as much as 2,891 million (59.78%) and in urban areas as many as 1.945 million people (40.22%). Given the number of poor people in rural areas more than urban areas, and therefore poverty reduction in rural areas needs to be addressed and handled more conceptual, systematic and sustainable. In accordance with the Regulation of the Central Java Governor Number 11 in 2015 on the Financial Aid To the Village Administration To Pioneer Village Model Berdikari In Central Java province Year 2015, then to tackle poverty in Rural Blora been appointed village: Temulus, Sumberejo and Pilang subdistrict of Randublatung as Pilot Model Village Berdikari. Types of Activities chosen to reducing poverty is a goat farm, paving and batik printing. The purpose of this study to determine the extent of the implementation of poverty reduction policies through Pioneer Village Model Berdikari. The method used in this research is qualitative descriptive model. In analyzing the data obtained in the field by using the theory of Van Meter and Van Horn. Results of this study, that the implementation of the policy of program Pioneer Village Model of Self-reliance can run well, while necessary improvements in terms of regulation, implementation, coordination, communication, synchronization and synergy program between Central Java Provincial Government and District Blora.

Keyword: Poverty, Berdikari Village, synergy, descriptive-qualitative

1. Latar Belakang

Berangkat dari permasalahan kemiskinan di Jawa Tengah, dan sejalan dengan strategi serta kebijakan sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menggulirkan program Desa Berdikari dengan harapan dapat diwujudkan secara bertahap pada rentang waktu 2015-2018. Program ini tertuang pada Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa Untuk Rintisan Model Desa Berdikari Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Program/kegiatan difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi produktif didukung program/kegiatan dalam lingkup sosial budaya dan lingkungan. Penjaringan usulan kegiatan prioritas dilakukan secara *bottom up*, dengan melibatkan masyarakat untuk menemukan potensi dan kebutuhan desa melalui rembuk warga dengan pendampingan oleh fasilitator dan Kader Desa Berdikari (KDB).

Sejalan dengan isu strategis RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu pengurangan kemiskinan serta arah kebijakan pengurangan kemiskinan diprioritaskan pada wilayah dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi, maka pemilihan lokasi diprioritaskan pada 15 kabupaten dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata provinsi dan nasional. Perwujudan Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pemilihan 45 desa pada 15 Kecamatan di 15 Kabupaten dengan kriteria sebagai berikut:

Kriteria Kabupaten, lokasi desa model dipilih dari kabupaten yang mewakili:

- a) Letak geografis wilayah utara (pantai utara/ pantura), wilayah tengah (pegunungan dan dataran) dan wilayah selatan (pantai selatan/pansela dan pegunungan).

- b) Kabupaten dengan tingkat kemiskinan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode September 2012 (Data Makro, BPS).

Kriteria Kecamatan, lokasi desa model dipilih dari kecamatan yang mewakili:

- a) Kecamatan pada Kabupaten hasil kriteria penilaian Kabupaten sasaran.
- b) Kecamatan yang memiliki unggulan tertentu tetapi merupakan kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi (berdasarkan data PPLS 2011, BPS).

Kriteria Desa, lokasi desa model dipilih dari 3 desa yang mewakili:

- a) Desa pada kecamatan hasil penilaian kecamatan sasaran.
- b) Desa yang memiliki letak geografis berdekatan dengan desa dengan mempertimbangkan potensi dan interrelasi antar desa.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 di kabupaten Blora ?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat implementasi Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 di kabupaten Blora ?
3. Bagaimana Model Rintisan Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 di kabupaten Blora agar lebih tepat target dan sasaran ?

2. Pendekatan Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Pelaksanaan Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Guna mendalami fokus tersebut, penelitian ini menggunakan paradigma fenomenologi, yang didalam penelitian sosial dikenal dengan paradigma penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena fenomena yang diamati perlu pengamatan terbuka, lebih mudah berhadapan dengan realitas, kedekatan emosional antara peneliti dan informan sehingga didapatkan data yang mendalam. Penelitian kualitatif memiliki tujuan untuk mengeksplorasi kekhasan pengalaman seseorang ketika mengalami suatu fenomena sehingga fenomena tersebut dapat dibuka dan dipilih sehingga dicapai suatu pemahaman yang ada. Dalam menganalisa data menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Teori yang dipakai sebagai acuan melakukan penelitian ini adalah teori kebijakan publik, implementasi kebijakan dan teori kemiskinan.

2.1. Informan Penelitian

Subyek dalam penelitian ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Bapermades) Provinsi Jawa Tengah, BPMPKB (Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana), Kecamatan, Desa, Tokoh Masyarakat Desa, Kader Desa Berdikari dan masyarakat penerima bantuan. Adapun lokasi penelitian di Kantor adalah BPMPKB Blora, Kecamatan Randublatung, Desa Temulus, Pilang dan Sumberejo.

2.2. Metode Pengumpulan data

Guna mendapatkan data yang akurat dan kredibel, dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengambilan data. Dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam, focus group discussion, teknik dokumentasi dan observasi.

3. Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari dan Kondisi Lokasi Penelitian

3.1. Pengertian

Pengertian Desa Berdikari sesuai yang tercantum didalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah desa yang: (1) mandiri dalam pemenuhan kebutuhan dasar (pangan, papan, energi, pendidikan dan kesehatan); (2) mampu menyelesaikan persoalan atas dasar kemampuan sendiri; (3) adil dan berdaulat dalam pengambilan keputusan menyangkut hajat hidup warganya melalui rembuan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, kearifan dan budaya lokal; (4) mampu bekerjasama setara dan saling menguntungkan dengan pihak lain; serta (5) mampu berjejaring dan bergotong-royong dalam satu kesatuan kawasan.

3.2. Sasaran

Program desa Berdikari memiliki tujuan memberdayakan desa dan masyarakat desa untuk mampu berorganisasi, bermusyawarah, berwirausaha sehingga masyarakat mampu mencukupi kebutuhan sendiri dan secara bersama menumbuhkan desa sebagai pusat ekonomi produktif.

3.3. Lokasi

Sejalan dengan isu strategis RPJMD Tahun 2013-2018 yaitu pengurangan kemiskinan serta arah kebijakan pengurangan kemiskinan diprioritaskan pada wilayah dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata Provinsi, maka pemilihan lokasi diprioritaskan pada 15 kabupaten dengan persentase kemiskinan di atas rata-rata Provinsi dan Nasional. Perwujudan Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah dilakukan melalui pemilihan 45 desa pada 15 Kecamatan di 15 Kabupaten dengan kriteria sebagai berikut. Lokasi desa model dipilih dari kabupaten yang mewakili:

- a) Letak geografis wilayah utara (pantai utara/ pantura), wilayah tengah (pegunungan dan dataran) dan wilayah selatan (pantai selatan/pansela dan pegunungan).
- b) Kabupaten dengan tingkat kemiskinan berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional pada periode September 2012 (Data Makro, BPS).

3.4. Pendekatan dan Strategi

Untuk mewujudkan Rintisan Model Desa Berdikari Tahun 2015, digunakan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, yaitu proses pembangunan yang mengacu kepada kebutuhan masyarakat, direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat dengan sebesar-besarnya memanfaatkan potensi sumberdaya yang ada dan dapat diakses oleh masyarakat setempat. Pembangunan berbasis masyarakat bertumpu pada: Potensi sumberdaya lokal, modal sosial, budaya, kearifan lokal, modal spiritual. Sejalan dengan pendekatan tersebut, strategi yang diterapkan adalah dengan pembangunan partisipatif dibarengi dengan pemberdayaan yang berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan. Pembangunan partisipatif adalah proses pembangunan bersama masyarakat sejak pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pemanfaatan hasil pembangunan. Sedang pemberdayaan memiliki makna ganda dalam arti pengembangan kapasitas dan pemberian kekuasaan kepada masyarakat untuk memilih yang terbaik sesuai dengan kebutuhan dan sumberdaya yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan.

3.5. Kondisi Kemiskinan Di Jawa Tengah

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama September 2013 - Maret 2014, Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah naik sebesar 4,27%, yaitu dari Rp. 261.881,- per kapita per bulan pada September 2013 menjadi Rp. 273.056,- per kapita per bulan pada Maret 2014.

Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan. Garis Kemiskinan di daerah perkotaan lebih tinggi dibanding garis kemiskinan perdesaan. Untuk daerah perkotaan Garis Kemiskinan Maret 2014 sebesar

Rp.279.036,- per kapita per bulan atau naik 3,96% dari kondisi September 2013 (Rp.268.397,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 4,53% menjadi sebesar Rp.267.991,- per kapita per bulan dibandingkan dengan September 2013 yaitu sebesar Rp.256.368,- per kapita per bulan. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2014 mencapai 4,836 juta jiwa (14,46%), meningkat sekitar 25,11 ribu jiwa (0,02%) dibandingkan penduduk miskin pada September 2013 sebesar 4,811 juta jiwa (14,44%).

Pada periode September 2013 – Maret 2014, distribusi penduduk miskin antara daerah perkotaan dan perdesaan tidak banyak berubah. Pada September 2013, sebagian besar (60,24%) penduduk miskin berada di daerah perdesaan begitupun pada Maret 2014 (59,78%). Selama periode September 2013 – Maret 2014, penduduk miskin di daerah perkotaan meningkat sekitar 32,21 ribu jiwa (dari 1,913 juta jiwa pada September 2013 menjadi 1,945 juta jiwa pada Maret 2014), sementara di daerah perdesaan berkurang 7,09 ribu jiwa (dari 2,898 juta jiwa pada September 2013 menjadi 2,891 juta jiwa pada Maret 2014). Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2013 sebesar 12,52% meningkat menjadi 12,68% pada Maret 2014 sedangkan persentase penduduk miskin di daerah perdesaan menurun dari 16,05% menjadi 15,96% pada periode yang sama.

3.6. Geografi dan Demografi kabupaten Blora

Kabupaten Blora terdiri dari 16 kecamatan, 271 desa dan 24 kelurahan, mencakup 941 dusun, 1.189 rukun warga dan 5.450 rukun tetangga. Luas wilayah Kabupaten Blora sebesar 1.820,59 km² atau sekitar 5,5% dari luas wilayah Propinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Blora terdiri atas lahan sawah sebesar 46.089,224 hektar (25,32 persen), dan sisanya lahan bukan sawah sebesar 74,68%. Menurut luas penggunaan lahan, lahan terluas berupa hutan (49,66%), selanjutnya berupa lahan sawah (25,32%) dan sisanya berupa tegalan (14,41%)

Jumlah penduduk kabupaten Blora pada bulan Maret tahun 2015 sebanyak 980.079 orang, dengan perincian laki-laki 489.544 jiwa, perempuan 490.535 jiwa. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan Blora dan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Bogorejo. Persentase kemiskinan mengalami penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, angka kemiskinan Kabupaten Blora sebesar 16,27% (134,939 jiwa), tahun 2011 menjadi 16,24 % (134,900 jiwa), tahun 2012 menjadi sebesar 15,11% (124,800 jiwa) dan pada tahun 2013 menjadi 14,64% (123.800 jiwa) dan pada tahun 2014 menjadi 13,66% (111,980), seperti diperlihatkan oleh grafik berikut ini.

3.7. Lokasi dan Perkembangan Rintisan Model Desa Berdikari Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 di Kabupaten Blora.

Implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Rintisan Model Desa Berdikari Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 di Kabupaten Blora meliputi Desa Temulus, Desa Sumberejo dan Desa Pilang yang berada di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora Jawa Tengah.

Desa Temulus

Bantuan dari Pemerintah Provinsi diberikan kepada kelompok masyarakat (Pokmas) di Desa Berdikari. Bantuan dana sebesar Rp. 100.000.000,- diberikan kepada 2 (dua) Pokmas. Masing-masing Pokmas menerima bantuan dana sebesar Rp. 50.000.000,-. Dana yang diterima oleh Pokmas dikelola secara swakelola. Hasil wawancara di lapangan adalah, masing-masing Pokmas menerima bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- dan telah diterima oleh Pokmas “Putra Mandiri” dan “Tunas Muda”, telah dipergunakan dan dipertanggung jawabkan 100 % sesuai dengan perencanaan yang telah disusun bersama oleh kelompok. Dana bantuan yang diterima Pokmas Putra Mandiri menghasilkan swadaya masyarakat

sebesar Rp. 1.500.000,-. Sedangkan Pokmas Tunas Muda mampu menghasilkan swadaya dari masyarakat sebesar Rp.2.500.000,-. Penggunaan Dana Bantuan Pokmas “Putra Mandiri” telah dipergunakan untuk membeli: diesel 16 pk, Diesel 8 pk, Cetakan Paving, Cetakan Batako, Mixer, Kerangka Mesin Cetak. Sedangkan Dana Bantuan keuangan yang di terima oleh Pokmas “ Tunas Muda” dipergunakan untuk membeli: kambing Etawa (usia 10 sampai 15 bulan) sebanyak 20 ekor, sentrat 10 karung. Disamping untuk membeli peralatan cetakan paving, batako, kambing dan sentrat, juga digunakan untuk membeli: alat tulis kantor, mencetak undangan, rapat sosialisasi, rapat penerimaan dana, laporan pertanggungjawaban, penjilidan dan perjalanan dinas untuk bimbingan proposal Desa Berdikari di kantor Kecamatan Randublatung dan Kantor BPMPKB Blora.

3.8. Desa Sumberejo

1. Anggota Pokmas “Pernakan Kambing” terdiri dari berbagai profesi pekerjaan, berjumlah 20 orang

anggota. Dana bantuan dipergunakan untuk: membeli bibit kambing umur 4 – 6 bulan, sentrat, biaya mencetak undangan, biaya Rapat Sosialisasi, biaya rapat penerimaan dana bantuan, membeli ATK dan biaya Laporan Pertanggungjawaban.

2. Anggota Pokmas “Paving dan Batako Press”.

Anggota Pokmas ini sebanyak 10 orang. Dana bantuan digunakan untuk keperluan membeli peralatan Paving dan Batako Press serta dipergunakan untuk keperluan administrasi, dan membeli: mesin Diesel 16 pk satu biji, Mesin Diesel 8 pk satu biji, Cetakan Paving P: 20 cm, L: 10 cm, T: 6 cm, Vol: 6 biji, cetakan Batako P: 38 cm, L: 10 cm T: 18 cm Vol: 4 biji, mixer (Mesin Pengaduk) diameter: 125 cm, T: 42 cm. kerangka mesin cetak P: 80 cm, L: 50 cm, T: 160 cm, biaya mencetak undangan, biaya rapat Sosialisasi, membeli snack, makan, biaya rapat penerimaan dana, membeli ATK, kertas HVS, buku, bulpoint, penggaris, penghapus/stip, tipe x, stempel, fotocopy, materai 6000, biaya dokumentasi, biaya laporan pertanggungjawaban, penjilidan dan biaya perjalanan Dinas.

3.9. Desa Pilang

Pokmas UEP “Usaha Mandiri”.

Kelompok ini mempunyai anggota 20 orang, telah menerima Dana Bantuan keuangan dari Provinsi Jateng sebesar Rp. 50.000.000,- untuk membeli peralatan pencetak Paving dan kegiatan administrasi. Hasil produksi paving dari kelompok Usaha Mandiri ini telah dibeli oleh desa sendiri untuk membangun lorong-lorong desa, sebagian dibeli oleh desa lain. Tenaga kerja untuk pembuatan paving diambilkan dari anggota Pokmas yang berasal dari desa Pilang. Besarnya upah tenaga kerja pembuatan paving per cetakan papan Rp. 1.500,-. Adapun setiap Cetakan papan paving berisi 6 batako.

Pokmas UEP “Kencana Batik”

Anggota pokmas Kencana Batik sebanyak 18 anggota. Sebanyak enam belas anggota sudah memiliki tanah rumah sendiri, sedangkan yang empat orang belum mempunyai tanah sendiri, akan tetapi masih menumpang. Semua anggota telah mempunyai rumah yang terbuat dari kayu, namun sebanyak sebelas anggota rumahnya masih berlantai tanah, dua orang anggota berlantai kayu dan selebihnya sebanyak enam orang, lantainya sudah menggunakan paving. Hanya ada seorang anggota Pokmas “Kencana Batik” yang lantainya sudah menggunakan keramik. Anggota pokmas ada yang mempunyai ternak sebanyak sebelas orang, sedangkan lainnya tidak mempunyai ternak sebanyak sembilan orang, sebanyak sembilan orang anggota pokmas masih menjadi satu antara rumah dan ternaknya

4. Implementasi Kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari di Kabupaten Blora

4.1 Pencapaian Tujuan Kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari

Desa Temulusmerasakan bahwa dana Bantuan Keuangan dari Provinsi bermanfaat sekali bagi masyarakat, bahkan diharapkan pada tahun yang akan datang masih ada tambahan bantuan modal lagi dari Pemerintah Provinsi, agar dapat menjamin keberlangsungan usaha pokmas Untuk desa Sumberejo, dana bantuan yang diterima Pokmas UEP Peternakan Kambing, menghasilkan swadaya masyarakat sebesar Rp. 2.500.000,-. Dana dari swadaya masyarakat tersebut dipergunakan untuk biaya pembuatan kandang ternak kambing komunal, untuk 20 ekor kambing. Sedangkan Pokmas UEP Paving dan Batako Press mampu mengumpulkan swadaya dari masyarakat sebesar Rp. 1.850.000,-. diharapkan ada tambahan bantuan modal lagi dari Pemerintah Provinsi, agar dapat menjamin keberlangsungan usaha pokmas dimasa yang akan datang. Di desa Sumberejo, masing-masing Pokmas menerima bantuan sebesar Rp. 50.000.000,- Dengan bantuan tersebut menghasilkan swadaya masyarakat sebesar Rp. 2.500.000,-. Dana swadaya dipergunakan untuk biaya pembuatan kandang ternak kambing komunal, untuk menampung sebanyak 20 ekor kambing milik kelompok. Sedangkan Pokmas UEP Paving dan Batako Press mampu mengumpulkan swadaya dari masyarakat sebesar Rp. 1.850.000,-.

Desa Pilang telah membentuk Pokmas UEP Usaha Mandiri dan Kencana Batik. Permasalahannya adalah keadaan ekonomi masyarakat desa dalam tingkatan menengah kebawah. Kondisi demikian mengakibatkan kendala bagi Pokmas untuk memasarkan hasil produksinya. Pemecahan masalah yang dilakukan adalah: mengadakan penggalian sumber dana dengan cara iurandari para anggota kelompok, mengajukan permohonan bantuan (proposal) modal usaha kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten Blora, mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Melalui cara ini, diharapkan dapat mengenalkan hasil produk dari pokmas kepada konsumen luar daerah.

Pada saat pembentukan UEP Pokmas “Usaha Mandiri” dan “Kencana Batik”, Pemerintah Desa Pilang melakukan rapat desa secara musyawarah dan terbuka, dihadiri oleh masyarakat dan dilakukan secara transparan. Penyerahan dana bantuan keuangan di dalam forum musyawarah desa secara transparan, yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Bendahara Desa, Badan Perwakilan Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Pemuka masyarakat, Ketua RT, Ketua RW dan Kader Desa Berdikari. Dalam perjalanannya, setelah terbentuk dan mulai menjalankan usahanya, Pokmas menemui kendala berupa kekurangan modal usaha, oleh karena itu Pemerintah Provinsi masih perlu memberikan modal usaha kepada Pokmas agar dapat dipergunakan untuk tambahan modal usaha. Karena keadaan ekonomi masyarakat desa dalam tingkatan menengah kebawah. Kondisi ini mengakibatkan kendala bagi Pokmas untuk memasarkan hasil produksinya. Pemecahan masalah: mengadakan penggalian sumber dana dengan cara iurandari para anggota kelompok, mengajukan permohonan bantuan (proposal) modal usaha kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah atau Pemerintah Kabupaten Blora mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh dinas terkait. Melalui cara ini, diharapkan dapat mengenalkan hasil produk dari pokmas kepada konsumen luar daerah.

4.2. Komunikasi

Keberhasilan implementasi sebuah kebijakan salah satu faktor yang menentukannya adalah komunikasi. Dari hasil penelitian, hubungan komunikasi dengan pelaksanaan Rintisan

Model Desa Berdikari, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung terdiri dari: adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten, pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar, terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Intensitas sosialisasi kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari sudah baik karena sosialisasi tidak hanya dilaksanakan oleh Tingkat Provinsi saja namun juga di Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada Camat, Kepala Desa, BPD, LKMD, bahkan sosialisasi hingga warga masyarakat lainnya.

4.3. Sumber Daya

Para informan mempunyai tanggapan yang beragam mengenai sumber daya ini, namun mereka sepakat perlu adanya peningkatan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun yang lainnya.

- 1). Kecukupan SDM di BPMPKB, sangat kurang memadai, karena satu bidang hanya ada 3 orang, 4 orang satu honorer jumlahnya kurang sekali, selama ini hanya ada 3 orang yang membidangi desa berdikari.
- 2). Fasilitas Pendukung untuk Kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari adalah kurang sekali. Hasil penelitian mengungkapkan, bahwa tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, ada yang pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat.

4.4. Sikap Pelaksana

Dalam proses pelaksanaannya, lembaga Desa juga kurang dilibatkan, misalnya LKMD kurang dilibatkan. Berdasarkan hasil wawancara, lembaga-lembaga Desa kurang dilibatkan dalam program Rintisan Model Desa Berdikari. Namun partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari sangat baik. Dari hasil penelitian adanya peningkatan ekonomi masyarakat, penguatan kewirausahaan masyarakat, meskipun lembaga Desa tidak dilibatkan secara optimal.

Para pelaksana telah memiliki tindakan dan langkah-langkah positif untuk melaksanakan program Rintisan Model Desa Berdikari dan memiliki respon baik terhadap kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari dan mendukung program tersebut. Hasil penelitian mengungkapkan, tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari. Mereka menganggap dana Rintisan Model Desa Berdikari merupakan Program Provinsi. Dalam hal sikap pelaksana, para informan mempunyai tanggapan yang senada, yaitu terdapat sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari.

4.5. Struktur Birokrasi

Dalam struktur organisasi pelaksana kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari perlu adanya pembagian tugas yang jelas dari para pelaksana sampai tingkat desa. Dalam Pelaksanaan program ini, yang aktif menangani adalah BPMPKB, belum semua dinas terkait masuk ke desa untuk mengeroyok program ini agar tujuan Desa Berdikari segera terwujud. SKPD yang dilibatkan pada waktu awal diantaranya Disperindagkop, Peternakan, Bappeda, Pengusaha dan stekholder lainnya. Koordinasi belum dilakukan dengan baik antara para pelaksana Rintisan Model Desa Berdikari antara Provinsi dengan Kabupaten dan tingginya ego sektoral SKPD Blora. Sudah ada pembentukan struktur organisasi pelaksana Rintisan Model Desa Berdikari, namun tidak semua pelaksana Rintisan Model Desa Berdikari melakukan pembagian tugas.

4.6. Lingkungan

Hasil penelitian terhadap fenomena lingkungan pelaksana kebijakan organisasi, sebagai berikut:

1). Kapasitas Lingkungan, peneliti mendapatkan data terkait dengan kemampuan BPMPKB dan kecamatan dan lembaga kemasyarakatan desa dalam mempengaruhi kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari. Awalnya yang menangani dan mengkoordinir program Rintisan Model Desa Berdikari adalah Bappeda, namun dalam perkembangannya, selanjutnya yang menangani adalah BPMPKB.

Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa BPD dan Lembaga Kemasyarakatan Desa mempunyai kapasitas, berupa pengawasan oleh BPD sedangkan Lembaga Kemasyarakatan membantu Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan Rintisan Model Desa Berdikari.

2). Kestabilan Peran

Dari hasil wawancara, BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari.

3). Kompleksitas Lingkungan

Dari hasil penelitian terungkap bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari. Terkait dengan kompleksitas lingkungan, hasil penelitian menemukan bahwa tidak terlalu banyak campur tangan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari.

4.7. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Terkait dengan ukuran dan tujuan kebijakan, para informan mempunyai tanggapan yang berbeda. Namun pada prinsipnya terdapat kesesuaian program dengan kebijaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari dan adanya ketepatan sasaran dengan rencana Rintisan Model Desa Berdikari yang telah ditentukan, seperti hasil penelitian sebagai berikut:

Kesesuaian Program

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat dimaknai bahwa Pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari telah ada kesesuaian dengan kebijakan Gubernur mengenai Rintisan Model Desa Berdikari. Semua kegiatan telah sejalan dengan kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari dan dijabarkan dalam bentuk program oleh desa penerima bantuan di wilayah Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora, sesuai dengan kebutuhan dan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusianya masing-masing desa.

Ketepatan Sasaran.

Bila dibandingkan dengan rencana Rintisan Model Desa Berdikari, semua desa bisa tepat sasaran, namun ada desa yang dalam melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada. Harapannya, desa berdikari bisa menjadi contoh untuk desa lainnya. Oleh karena itu diharapkan ada sentuhan dari pimpinan atas tentang pemberdayaan masyarakat, semua harus bertanggung jawab, bukan kelompok saja.

5. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dari hasil penelitian terkait hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari, ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat.

5.1. Faktor Komunikasi

Faktor Pendukung Komunikasi. Dari hasil penelitian terkait hubungan komunikasi dengan pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari, faktor pendukungnya adalah: adanya sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten, pencapaian informasi dari pembuat kebijakan ke

pelaksanaan kebijakan berjalan lancar, terdapat konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah, tidak terdapat perintah yang bertentangan.

Faktor Penghambat Komunikasi. Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari belum optimal,

5.2. Faktor Sumber Daya

Dari hasil penelitian terkait hubungan sumber daya dengan pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

Faktor Pendukung Sumber Daya. Faktor pendukung tersebut adalah: adanya kemampuan para pelaksana untuk memberi dorongan kepada masyarakat agar tercapainya keberhasilan program dalam kegiatan Rintisan Model Desa Berdikari, adanya kemampuan pelaksana kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari.

Faktor penghambat Sumber Daya adalah terbatasnya secara kuantitas pelaksana Rintisan Model Desa Berdikari, kalaudari segi kualitas sudah memadai. tidak ada dukungan dana dari Pemerintah Kabupaten yang memadai.

5.3. Faktor Sikap Pelaksana

Terkait dengan pelaksanaan kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari, hasil penelitian terhadap sikap

pelaksana terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

Faktor Pendukung Sikap Pelaksana. Faktor pendukung tersebut adalah: adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari, adanya tindakan dan langkah-langkah nyata dari pelaksana Rintisan Model Desa Berdikari dan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor Penghambat Sikap Pelaksana. Faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah ada anggapan bahwa Rintisan Model Desa Berdikari merupakan program Provinsi, maka tidak didukung sepenuhnya oleh Pemerintah Kabupaten.

5.4. Faktor Struktur Birokrasi

Dari hasil penelitian terkait hubungannya struktur birokrasi dengan pelaksanaan Rintisan Model Desa

Berdikari, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

Faktor Pendukung Struktur Birokrasi. Faktor pendukung tersebut adalah sudah terbentuknya struktur organisasi berupa Tim Pelaksana Rintisan Model Desa Berdikari dari Kelompok Usaha Ekonomi Produktif.

Faktor Penghambat dari Struktur Birokrasi. Faktor penghambat dalam struktur Birokrasi ini adalah belum adanya koordinasi, komitmen dan sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

5.5. Faktor Lingkungan

Dari hasil penelitian terkait hubungan lingkungan dengan pelaksanaan Rintisan Model Desa

Berdikari, terdapat beberapa faktor pendukung dan penghambat.

Faktor Pendukung Lingkungan. Faktor pendukung tersebut adalah: adanya kapasitas Rintisan Model Desa Berdikari dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut mendukung kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari oleh BPD serta peran lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantupelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari.

Faktor Penghambat Lingkungan. Faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya LKMD dalam ikut membantu pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari, bahkan masih kurang turut campur tangan dalam pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari.

5.6. Faktor Ukuran Dan Tujuan Kebijakan

Faktor Pendukung Ukuran Dan Tujuan Kebijakan. Faktor pendukung adalah adanya kesesuaian antara pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari dengan kebijakan Gubernur mengenai Rintisan Model Desa Berdikari yang disesuaikan dengan potensi desa dan kemampuan SDM Pokmas.

Faktor Penghambat Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah kurangnya kemampuan kelompok pembuatan laporan, kemampuan memasarkan produk, tidak adanya sinergitas pelaksanaan program Rintisan Model Desa Berdikari antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten menjadi faktor utama yang menjadi penghambat, kurangnya sinergitas itu berdampak tidak berpartisipasi dalam program kegiatan di masing-masing SKPD kabupaten Blora.

6. Membangun Model Implementasi Kebijakan Rintisan Desa Berdikari

6.1. Konsepsi Model

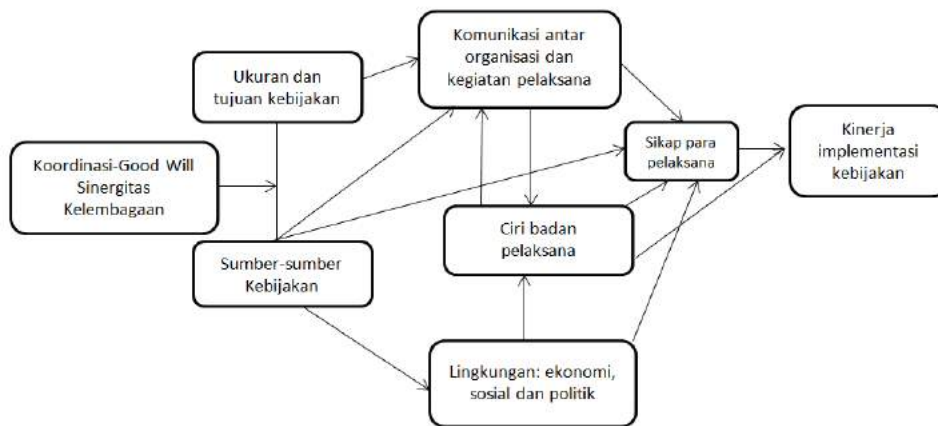
Rintisan Model Desa Berdikari merupakan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan di Provinsi Jawa Tengah. Dari hasil penelitian, bahwa keberhasilan pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari di kecamatan Randublatung lebih dominan dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, sumber daya, dan kapasitas organisasi masyarakat. Ketiga faktor tersebut secara berurutan menjadi tolak ukur keberhasilan program masyarakat karena ditemukan ada keterkaitan satu sama lain antara faktor-faktor tersebut.

6.2. Model Implementasi Kebijakan Rintisan Desa Berdikari

Sebagaimana dikatakan Korten (1983), faktor kepemimpinan ikut mempengaruhi dan salah satu kunci kesuksesan keberhasilan program masyarakat, dapat dilihat adanya kepemimpinan yang baik dari tokoh kunci masyarakat, pihak pemerintah lokal, dan pemimpin masyarakat lainnya, sehingga dapat dijadikan panutan oleh masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam pelaksanaan program. Begitu pun dengan sumber daya, tanpa kemampuan sumber daya maka mustahil pula keberhasilan program itu akan tumbuh, karena umumnya orang yang memiliki sumber daya memadai saja yang banyak aktif dalam pelaksanaan kegiatan, yang memiliki sumber daya yang terbatas (ekonomi lemah) sibuk dengan urusannya mencari nafkah dan tidak mampu memberikan sumbangan pikiran bagi pengembangan pelaksanaan program (pendidikan rendah).

Hasil penelitian Implementasi Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari ini adalah, program tersebut banyak melibatkan aktor pelaksana. Solusi yang diberikan oleh Van Matter Van Horn adalah penguatan dan komunikasi inter organisasi. Penelitian menemukan bahwa komunikasi inter organisasi program Rintisan Model Desa Berdikari sudah dapat dilaksanakan. Yang menjadi masalah adalah masih rendahnya koordinasi, komitmen dan *good will* pelaksana baik di tingkat Provinsi maupun di kabupaten. Oleh karena itu, diperlukan sinergitas kelembagaan, yang diikuti dengan kejelasan kewenangan dan tanggungjawab antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.

Gambar 6.1: Model Implementasi Kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari



Sumber:Adaptasi dari Model van Matter van Horn

7. Temuan Penelitian, Implikasi dan Proposisi

7.1.Temuan Penelitian

Model Komunikasi Kelembagaan Dan Penyusunan Program Kegiatan

Peran Pemerintah Kabupaten dalam Program Rintisan Model Desa Berdikari adalah membantu tugas yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi dalam pelaksanaan program sesuai dengan tingkatan wilayahnya.Peran Pemerintah Provinsi dalam Program Rintisan Model Desa Berdikaridi tingkat kecamatan, kabupaten lebih banyaksebagai fasilitator dan pembimbing saja. Masyarakat merupakan pelaku utama Program Rintisan Model Desa Berdikari. Program ini dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Dari pengamatan yang dilakukan peneliti menghasilkan temuan sebagai berikut:

a. Musyawarah Desa (Musdes)

Musyawarah desa merupakan pertemuan masyarakat desa sebagai ajang sosialisasi atau penyebaran informasi Program Rintisan Model Desa Berdikaridi desa. Dalam musyawarah desa dilakukan pemilihan Kader Desa Berdikari (KDB) yang terdiri dari satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, pemilihan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara. KDB merupakan warga desa terpilih yang bertugas memfasilitasi atau memandu masyarakat dalam mengikuti atau melaksanakan tahapan perencanaan pembangunan partisipatif dalam Program Rintisan Model Desa Berdikarimulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan serta pelaporan. Sedangkan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif berperan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di desa dan mengelola administrasi, serta keuangan Program Rintisan Model Desa Berdikari.

b. Penggalan Gagasan

Metode yang digunakan dalam pembuatan peta sosial pada pertemuan desa adalah 1) penentuan klasifikasi kesejahteraan dan pemetaan sosial. Tujuan penentuan klasifikasi kesejahteraan adalah mengelompokkan rumah tangga di desa dalam kategori kaya, menengah, dan kurang mampu. Hasil pengelompokan selanjutnya digunakan untuk menggambarkan rumah tangga yang ada di desa pada sebuah peta. Dalam proses ini, fasilitator mendokumentasikan kriteria dan daftar rumah tangga miskin. 2) Musyawarah

penggalan gagasan adalah pertemuan kelompok untuk menemukan gagasan sesuai kebutuhan masyarakat, gagasan yang berkaitan dengan pengembangan Usaha Ekonomi Produktif di perdesaan. 3) Musdes merupakan pertemuan masyarakat di desa yang bertujuan membahas seluruh gagasan kegiatan, hasil dari proses penggalan gagasan di kelompok. Peserta dmusdes meliputi: kades, perangkat desa, BPD, LKMD, wakil RTM desa, wakil perempuan RT, RW, tokoh masyarakat, dan anggota masyarakat lainnya yang berminat untuk hadir. Pada dasarnya proses komunikasi yang digunakan pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari dalam mensosialisasikan adalah dengan caramusyawarah. Dengan begitu proses sosialisasi selanjutnya akan lebih mudah karena ada banyak pihak yang ikut berperan serta dalam proses komunikasi

7.2. Sinergitas Kelembagaan Pelaksanaan Program.

Program Rintisan Model Desa Berdikari kurang berjalan optimal karena lemahnya koordinasi pelaksanaan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Blora. Kurang intensnya komunikasi terlihat Pemerintah Kabupaten tidak optimal berperan dalam melaksanakan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Pemerintah Kabupaten Blora tidak menganggarkan secara khusus untuk mendukung pelaksanaannya. SKPD tidak memiliki respons positif dalam pelaksanaannya, hanya BPMPKB kabupaten Blora yang aktif, meskipun SDM tidak mencukupi dan anggaran yang diambilkan dari dana rutin BPMPKB.

7.3. Rendahnya Good Will pemimpin

Lemahnya *good will* Pemerintah Kabupaten dan kurangnya kepedulian dalam sinergitas pelaksanaan kebijakan program terlihat pada tidak ada alokasi anggaran di APBD Blora untuk Program Rintisan Model Desa Berdikari. Padahal penanggulangan kemiskinan di Blora perlu dilakukan secara bertahap, terus menerus dan terpadu yang didasarkan pada kemandirian. Program Rintisan Model Desa Berdikari sebenarnya sudah mengatur tentang pendelegasian wewenang atau desentralisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap program penanggulangan kemiskinan, diupayakan sampai ke tingkat yang paling bawah. Pendelegasian kewenangan itu hanya ditangani satu SKPD, yaitu BPMPKB.

7.4. Implikasi Penelitian

Implikasi terhadap Model Partisipasi.

Pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari berdasarkan ketentuan dan prosedur yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa pedoman umum dan petunjuk teknis pelaksanaan program-program tersebut. Penyimpangan dari ketentuan dan prosedur dan ketentuan dapat mengganggu pelaksanaan program. Prosedur dan panduan proses pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari ditentukan oleh Pemerintah Provinsi. Ini lebih didasarkan pada pertimbangan untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan mulai dari penyusunan rencana sampai dengan pelestarian hasil-hasil kegiatan. Program Rintisan Model Desa Berdikari melibatkan masyarakat secara aktif dengan menempatkan mereka sebagai pelaku utama program.

7.5. Implikasi Terhadap Model Komunikasi Pelaksanaan Program

Dalam konteks komunikasi teori yang relevan dengan temuan penelitian adalah teori difusi inovasi. Teori difusi inovasi mengasumsikan bahwa peran komunikasi secara luas dalam merubah masyarakat melalui penyebaran ide-ide dan hal baru. Dalam proses penyebaran inovasi terdapat unsur-unsur utama antara lain: adanya suatu inovasi,

dikomunikasikan melalui saluran, terjadi dalam suatu jangka waktu tertentu dan ada sasaran atau para anggota suatu sistem sosial. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian, dimana langkah pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari dalam menyelenggarakan musyawarah di tingkat desa maupun kecamatan, telah memunculkan adanya proses difusi inovasi yang berkenaan dengan komunikasi pembangunan. Inovasi disini berupa suatu program pembangunan yang berbasis pemberdayaan masyarakat, disampaikan melalui forum musyawarah tingkat desa dan kecamatan, dan terjadi pada jangka waktu tertentu. Inovasi tersebut secara perlahan telah menjadi suatu adopsi yang dalam hal ini bisa terjadi penolakan ataupun penerimaan oleh masyarakat. Masyarakat yang menerima program tersebut akan ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Sedangkan masyarakat bukan penerima program tersebut akan kurang peduli dengan keberadaan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Program pembangunan tersebut bisa saja menjadi sesuatu yang inovatif bagi masyarakat namun belum tentu juga oleh masyarakat lain. Model komunikasi yang digunakan dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari adalah model komunikasi sirkuler Osgood-Schramm. Model ini menggambarkan suatu proses yang dinamis, yakni sumber dan penerima mempunyai kedudukan yang sederajat. Berbeda dengan model linear, dalam model ini semua pihak yang berkomunikasi saling memiliki peran sebagai pengirim. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian, bahwa dalam forum musyawarah baik di tingkat dusun, desa maupun tingkat kecamatan, antara pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari dengan perangkat desa maupun masyarakat saling bertukar pikiran untuk memberikan argumennya dalam menyusun program perencanaan pembangunan. Dan mereka pun memiliki kedudukan yang sama yakni sebagai subyek pembangunan.

Dari keseluruhan model di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa model-model tersebut mengarah pada model komunikasi banyak tahap, yakni pemerintah sebagai penggagas inovasi pembangunan menyampaikan kepada pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari, kemudian pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari menyosialisasikan kepada kepala desa beserta utusan desa yang berjumlah enam orang melalui forum Musyawarah Desa Sosialisasi. Setelah itu, kepala desa kembali ke desanya menyampaikan kepada tokoh masyarakat melalui forum Musyawarah Desa (Musdes), serta menyosialisasikan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat program melalui forum Musyawarah Dusun (penggalan gagasan).

Model banyak tahap ini lebih akurat dalam menjelaskan pembentukan opini dan sikap. Masyarakat (khalayak) dari sumber utama yakni pelaku Program Rintisan Model Desa Berdikari, bisa secara langsung atau tidak terlihat dengan jelas individu bisa mendapatkan informasi dari individu yang lain, atau dari kelompok lain. Intinya model komunikasi multi tahap ini menjelaskan bahwa pada dasarnya semua bisa mempunyai pengaruh dan dipengaruhi baik individu, maupun kelompok dengan berbagai cara, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perantara.

7.6. Implikasi Terhadap Model Pemberdayaan Masyarakat

Program Rintisan Model Desa Berdikari merupakan program pemberdayaan masyarakat. Secara umum pemberdayaan dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk memulihkan atau meningkatkan keberdayaan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawab mereka sebagai komunitas manusia dan warga Negara.

Upaya pemberdayaan masyarakat harus terarah (*targetted*). Ini yang secara populer disebut pemihakan. Ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. Karena dasarnya adalah kepercayaan kepada rakyat, maka program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan

dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Cara demikian meningkatkan kemampuan masyarakat dalam merancang, melaksanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. Selanjutnya, menggunakan pendekatan kelompok karena bila warga masyarakat secara sendiri-sendiri kurang berdaya untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Nilai-nilai yang dikembangkan dalam rangkaian kegiatan pengembangan kapasitas dalam Program Rintisan Model Desa Berdikari meliputi aspek pengutamakan kepentingan umum, kesamaan nilai dalam masyarakat, komunikasi antar warga, peningkatan kepercayaan diri masyarakat, pengembangan manajemen keorganisasian, manajemen kewirausahaan, jaringan kerja, peningkatan keterampilan dan keahlian, dan nilai-nilai kebersamaan dalam bermasyarakat. Pendekatan yang selama ini dijalankan dalam program Program Rintisan Model Desa Berdikari sesuai untuk semua lapisan masyarakat baik tua atau muda, baik berpendidikan rendah atau tinggi, namun masih perlu peningkatan pada program-program yang mendukung kesetaraan gender. Pengembangan kapasitas masyarakat sebagai salah satu prinsip dalam pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dalam Program Rintisan Model Desa Berdikari menyesuaikan dengan elemen-elemen pemberdayaan yang dilaksanakan yaitu pemberdayaan lingkungan, pemberdayaan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

7.7. Implikasi Terhadap Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka terdapat dua pilihan langkah yang bisa diambil, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut (Nugroho, 2008:494). Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi (Subarsono, 2009:87). Beberapa teori implementasi kebijakan yang bisa menjelaskan peran variabel-variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, seperti dikemukakan oleh *George C. Edward III, Merilee S. Grindle, Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier, Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn*.

Program Rintisan Model Desa Berdikari dalam pelaksanaannya agar ada koordinasi dan sinkronisasi program Pemerintah Provinsi dengan program penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Strategi yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut adalah melalui strategi pertumbuhan yang berkualitas (*quality growth*). Strategi ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dengan membangun kewirausahaan masyarakat miskin agar terciptanya peningkatan penghasilan keluarga miskin dan pengurangan beban pengeluaran keluarga miskin dan lebih jauh lagi adalah terciptanya kemandirian keluarga miskin dengan mendorong peningkatan simpanan/aset keluarga miskin. Dengan strategi pertama ini diharapkan keluarga miskin dapat ikut menikmati pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas.

Strategi lain adalah pemberdayaan, bertujuan mendorong penduduk miskin secara kolektif untuk terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terutama yang menyangkut dirinya termasuk untuk menanggulangi kemiskinan yang mereka alami sendiri. Dalam strategi ini, masyarakat miskin bukan lagi sebagai obyek program tetapi sudah menjadi subyek program penanggulangan kemiskinan bagi mereka sendiri, karena merekalah yang paling memahami permasalahan dan kondisi kemiskinan yang mereka alami.

Implementasi Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari bersifat Top Down. Hal tersebut sesuai dengan ulasan beberapa teori implementasi kebijakan baik yang dikemukakan Merilee S. Grindle, Edward III, Mazmanian & Sabatier maupun Van Meter & Van Horn. Keterlibatan banyak lembaga dari provinsi hingga lembaga-lembaga perdesaan

sebenarnya sebagai upaya untuk mempersiapkan sumber daya pendukung implementasi kebijakan, seperti dijelaskan dalam teori implementasi kebijakan Van Meter & Van Horn yang mengungkapkan bahwa faktor sumber daya merupakan salah satu variabel yang ikut menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Peran dan partisipasi pemerintah Kabupaten Blora dalam implementasi Program Rintisan Model Desa Berdikari di kecamatan Randublatung seperti diuraikan sebelumnya telah berjalan dengan baik. Ada beberapa peran dan partisipasi yang masih belum terfasilitasi dengan baik yaitu sinergi program penanggulangan kemiskinan dengan program Pemerintah Kabupaten Blora maupun dengan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah melalui TKPKD. Hal tersebut terjadi karena masih kurangnya pemahaman dan kepedulian para pelaku dari jajaran pemerintah Kabupaten Blora.

Berdasarkan uraian diatas, secara spesifik kurang optimalnya implementasi kebijakan program Rintisan Model Desa Berdikari karena rendahnya sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Blora. Sinergitas yang rendah karena kurang adanya *good will* pihak pemerintah kabupaten, sehingga keterlibatan aktif dalam menyatukan program dan pendanaan tidak terjadi. Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari merupakan kebijakan lokal yang memerlukan *good will*, koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, oleh karena itu penulis melihat perlunya adanya penambahan variabel pada model yang dikembangkan oleh Van Matter Van Horn agar sesuai dengan konsteks lokal dan dimensi sinergitas pemerintahan Indonesia di era otoda dengan mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun penambahan variabel itu adalah “Good Will-Koordinasi Antar Lembaga”.

7.8. Proposisi

Pelaksanaan program pemerintahan tingkat provinsi dengan standar dan ukuran, kebijakan/ukuran dan tujuan kebijakan, Sumber daya, Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana dan Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, Lingkungan sosial, ekonomi dan politik memerlukan Good Will-Koordinasi Antar Lembaga dari pemerintah kabupaten dan koordinasi semua SKPD fokus pada satu program dan alokasi anggaran agar kinerja implementasi dapat efektif dan efisien.

8. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

8.1. Implementasi Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari di Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat daritahap persiapan berupa persiapan penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban. Pencapaian tujuan Program Rintisan Model Desa Berdikari sudah optimal. Hal ini dapat dilihat dari pencapaian tujuan Program Rintisan Model Desa Berdikari, yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Pencapaian tujuan ini menjadi optimal dikarenakan desa penerima bantuan yaitu, Temulus, Pilang dan Sumberejo Kecamatan Randublatung adalah desa yang dikategorikan miskin sehingga sangat membutuhkan bantuan dana guna peningkatan kesejahteraan melalui usaha ekonomi produktif.

Hubungan komunikasi dengan implementasi kebijakan terlihat ada konsistensi pesan, artinya tidak ada pesan yang saling bertentangan. Intensitas sosialisasi kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari sudah baik karena sosialisasi tidak hanya dilaksanakan oleh Tingkat Provinsi, Tingkat Kabupaten yang ditujukan kepada kepada Camat, Ketua Tim Penggerak

PKK Kecamatan, Kepala Desa, BPD, LKMD, dan Ketua Tim Penggerak PKK Desa, bahkan sosialisasi hingga Kepala Desa kepada Perangkat Desa dan warga masyarakat lainnya. Hubungan sumber daya dengan implementasi kebijakan, tingkat kemampuan pelaksana tidak merata, artinya secara pendidikan mereka rendah sehingga mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah dengan cepat dan dengan dana terbatas, namun hal ini tidak mempengaruhi pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari karena mereka mempunyai kemampuan untuk menggerakkan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian terhadap fasilitas pendukung terungkap bahwa dukungan anggaran dari pendapatan desa dan sarana prasarana lainnya tidak ada. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif memiliki semangat berdikari untuk mensukseskan program Rintisan Model Desa Berdikari. Hubungan sikap pelaksana dengan implementasi kebijakan, pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari dan sangat mendukung serta mengharapkan dana Rintisan Model Desa Berdikari terus digulirkan bahkan ditingkatkan. Demikian juga dalam hasil penelitian terungkap bahwa tidak semua pelaksana memiliki respon baik terhadap kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari, karena menganggap dana Rintisan Model Desa Berdikari merupakan program Provinsi. Hubungan struktur birokrasi dengan implementasi kebijakan, koordinasi tidak dilakukan dengan baik diantara para pelaksana Rintisan Model Desa Berdikari baik antara provinsi dengan kabupaten dan tingginya ego-sektoral antar SKPD di kabupaten Blora. Hubungan lingkungan dengan implementasi kebijakan, terungkap bahwa BPD telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari, namun Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya belum terlalu berperan dalam mendukung kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari. Hubungan ukuran dan tujuan kebijakan dengan implementasi kebijakan, ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana Rintisan Model Desa Berdikari, bahwa semua desa bisa tepat sasaran bahkan ada yang kegiatannya melebihi yang direncanakan. Terungkap bahwa Pelaksanaan Rintisan Model Desa Berdikari telah sesuai dengan kebijakan gubernur mengenai Rintisan Model Desa Berdikari. Namun demikian tidak semua kebijakan Rintisan Model Desa Berdikari telah dijabarkan dalam bentuk program karena disesuaikan dengan potensi masing-masing desa. Hasil penelitian terungkap bahwa semua desa bisa tepat sasaran bahkan ada yang melebihi kegiatan yang direncanakan.

8.2. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Faktor Pendorong

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan. Terdapat faktor pendukung yang memperlancar pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari di Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora dalam faktor komunikasi yaitu: sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Kabupaten, informasi dari pembuat kebijakan ke pelaksana kebijakan berjalan lancar dan konsistensi dalam pencapaian pesan/perintah kebijakan artinya tidak terdapat perintah yang bertentangan. Faktor pendukung sumber daya yaitu, kemampuan pelaksana memberi dorongan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam kegiatan Program Rintisan Model Desa Berdikari, kemampuan pelaksana kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari dalam melakukan identifikasi dan menyelesaikan masalah dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Faktor pendukung sikap pelaksana yaitu: adanya persepsi pelaksana yang mendukung kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari dan adanya tindakan dan langkah-langkah dari nyata dari pelaksana Program Rintisan Model Desa

Berdikari, dan pelaksanaan kegiatan operasionalnya Pemerintahan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor struktur organisasi yaitu sudah terbentuknya Tim Pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari. Untuk faktor Lingkungan yaitu; adanya kapasitas BPD dan Lembaga kemasyarakatan desa dalam ikut mendukung kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari berupa kewenangan pengawasan atas pelaksanaan Program Rintisan Model Desa oleh BPD serta peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam ikut membantu pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari, sudah berperannya BPD dalam ikut mengawasi pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari, adanya dukungan masyarakat berupa tenaga dalam gotong royong dan swadaya masyarakat. Sedangkan faktor pendukung ukuran dan tujuan kebijakan yaitu adanya kesesuaian antara pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari dengan kebijakan Gubernur Jawa Tengah mengenai Program Rintisan Model Desa Berdikari meskipun tidak semua kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari dilaksanakan sesuai program oleh Desa penerima bantuan dana di wilayah Kecamatan Randublatung, karena disesuaikan dengan potensi alam dan kemampuan SDM masing-masing desa.

b. Faktor penghambat

Faktor penghambat dalam komunikasi ini adalah sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari belum optimal, sehingga pemahaman masyarakat mengenai Program Rintisan Model Desa Berdikari kurang, hal ini akan berakibat pada sulitnya mengajak partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari maupun dalam pengawasan kegiatan. Sedangkan faktor penghambat sumber daya ini adalah terbatasnya pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari, sehingga pelaksanaan mengenai Program Rintisan Model Desa Berdikari kurang optimal, tidak adanya dukungan pendanaan dari kabupaten Blora.

Faktor penghambat dalam sikap pelaksana adalah kurang responnya para pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari yang menganggap kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari adalah sebuah kebijakan Provinsi Jawa Tengah sehingga tidak memiliki *good will*, tanggungjawab dan kewenangan untuk mengoptimalkan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Sedangkan faktor penghambat dalam struktur organisasi ini adalah belum adanya pembagian tugas diantara Tim pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari antara Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Blora sehingga kurangnya koordinasi Tim pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari. Dan faktor penghambat dalam lingkungan ini adalah belum berperannya SKPD di pemerintahan kabupaten Blora tidak berpartisipasi dalam perencanaan program dan alokasi anggaran yang bersinergi dengan Program Rintisan Model Desa Berdikari. Sedangkan faktor penghambat dalam ukuran dan tujuan kebijakan ini adalah kurangnya ketepatan sasaran apabila dibandingkan dengan rencana Program Rintisan Model Desa Berdikari, bahkan ada yang belum dapat menyelesaikan laporan kegiatannya direncanakan. Meskipun demikian ada juga desa yang melaksanakan kegiatan melebihi dari rencana yang ada.

8.3. Model implementasi kebijakan program Rintisan Model Desa Berdikari

Rendahnya sinergitas antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Blora. Sinergitas yang rendah karena kurang adanya *good will* pihak Pemerintah Kabupaten, sehingga keterlibatan aktif dalam menyatukan program dan pendanaan tidak terjadi. Kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari merupakan kebijakan lokal yang memerlukan *good will*, koordinasi yang baik antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, oleh karena itu penulis melihat perlunya adanya penambahan variabel pada model yang dikembangkan oleh Van Matter Van Horn agar sesuai dengan konteks lokal dan

dimensi sinergitas pemerintahan Indonesia di era otonomi dengan mengacu pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun penambahan variabel itu adalah “Good Will-Koordinasi Antar Lembaga”.

9.2. Saran

Ada beberapa saran agar pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari dapat berjalan efektif, tepat sasaran dan mampu merubah sikap dan perilaku masyarakat miskin agar lepas dari lingkaran setan kemiskinannya. Saran dimaksud adalah:

1. Sosialisasi terhadap kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari.
2. Pelaksana Program Rintisan Model Desa Berdikari diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan usaha. Dan perlu dibangun sistem aplikasi komputer yang memungkinkan akurasi dan kecepatan data.
3. Perlu pengaturan yang jelas mengenai kedudukan, tugas dan fungsi dari LKMD, khususnya dalam pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari.
4. Optimalisasi pendampingan di tingkat Pemerintah Kabupaten oleh BPMPKB Blora, agar mampu mendorong kepedulian dan keterlibatan Pemerintah Kabupaten terhadap pelaksanaan Program Rintisan Model Desa Berdikari.
5. Desentralisasi yang lebih besar kepada para pelaksana di tingkat bawah yang langsung bersentuhan dengan *target group* (masyarakat miskin) sehingga mampu mengakomodir budaya dan kearifan lokal dalam penanggulangan kemiskinan.
6. Pemerintah Provinsi memberikan wewenang yang lebih besar kepada pemerintah daerah (Pemerintah Kabupaten Blora) untuk meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan program. Meningkatkan koordinasi antara pelaku-pelaku program-program pengentasan kemiskinan melalui Komite Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora. Komite ini belum berjalan sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai wadah koordinasi serta penajaman kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Blora.

Dengan adanya saran yang telah dikemukakan, penulis berharap kebijakan Program Rintisan Model Desa Berdikari tidak menjadi kebijakan yang politis untuk mendongkrak popularitas Pemerintah, namun diharapkan merupakan kebijakan yang berhasil guna bagi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta lebih mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi maupun golongan tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Penerbit Pancur Siwah
- Agus Dwiyanto dan Bevaola Kusumasari. (2003). *Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang Harus Dilakukan*. dalam Policy Brief, No. II/PB/2003.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Badan Pusat Statistik Dan Bappeda Blora. (2003). *Blora Dalam Angka*.
- Bank Dunia. (2006). *Era Baru Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. Jakarta: The World Bank Office
- Bupati Blora. (2015). *Peraturan Bupati Blora Nomor 33 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blora*. Blora: Arsip Bagian Hukum .

- Burhan Bungin, Agus Sukristyanto, V Rudy Handoko. (2016). *Buku Pedoman Penulisan MKPD, PROPOSAL, DAN DISERTASI Program Studi Doktor Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*, . Prenadamedia Group.
- Chambers, R. (1997). *Pembangunan Desa Mulai Dari Belakang*. Jakarta: LP3ES.
- Creswell, W. J. (2015). *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research* . Boston: Pearson.
- Danim, S. (2002). *Menjadi Peneliti Kualitatif*, . Bandung: PT Pustaka Setia.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2014). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, . Jakarta: PT Gramedia.
- Djam'an Satiri Aan Komariah. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabet .
- Dye, T. R. (1978). *Understanding Public Policy*, . New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Edward III, George C. (1980), *Implementing Public Policy*, Congressional Quarterly Press, Washington.
- Grindle, Merilee S. ed. . (1980). *Politics and Policy Implementation in the Third World*. Princeton University Press .
- Islamy, I. (2001). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Cetakan X, Bumi Aksara, .
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- Lexy, M. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif*, . Bandung: Rosdakarya..
- Maipita, I. (2014). *Mengukur Kemiskinan & Distribusi Pendapatan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier, (1983), *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Michael P Todaro. (1997). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. . Jakarta: Erlangga.
- Mubiyarto. (1995). *Program IDT dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media
- Nugroho D, Riant. . (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. . (2013). *Sistem Informasi Profil Daerah Kabupaten Blora Tahun 2013*.
- Sabatier, P. And HC Jenkins-Smith (Eds). (1993). *Policy Change And Learning An Advocacy*.
- Subarsono, A. (2006). *Pelayanan Publik Yang Efisien, Responsif, Dan Non-Partisan dalam Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* . Yogyakarta: GadjahMada University Press.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R & D* . Bandung: Alfabeta.
- Suharto, E. (1997). *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSP-STKS).
- Sumanta, J. (2005). Fenomena Lingkaran Kemiskinan, . *Jurnal Kebijakan Ekonomi, Program Magister Perencanaan Dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia, Volume I, Nomor 2, Desember 2005, Jakarta*.
- Suyanto, B. (2013). *Anatomi Kemiskinan Dan Strategi Penanganannya*. Malang: Intrans Publishing.
- Van Meter, D.S, and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Administration Society